

KUBE merupakan kelompok usaha bersama, dicanangkan oleh Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal usaha melalui program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial untuk mengelola usaha ekonomi produktif.

Desa Timbul Harjo, Sewon merupakan daerah penerima bantuan dana pemerintah tertinggi karena Sewon merupakan daerah peralihan dan masyarakat yang tergolong miskin paling tinggi. Program KUBE ini ditujukan kepada masyarakat yang tergolong miskin, namun program KUBE tidak menekankan pada aspek ekonomi semata, melainkan lebih menekankan pada pengembangan kapasitas dengan tujuan menanamkan nilai-nilai kewirausahaan dan kebersamaan relasi sosial para Keluarga Binaan Sosial.

Dengan adanya hal tersebut, maka disusunlah buku "Penguatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sebagai Model Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat" sebagai hasil dari penelitian. Buku ini terdiri dari lima (5) bab mengenai sekilas wilayah Kabupaten Bantul, profil KUBE di Kabupaten Bantul, Pemberdayaan Masyarakat, serta hasil dari penelitian yang telah dilakukan.



Dra. Anis Siti Hartati, M. Si. Lahir di Klaten 3 april 1965 . Ahli dalam Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, Perilaku Organisasi. Sebagai penulis Buku "*Peran Life Skills Dalam Peningkatan Self Efficacy, Self Esteem* , Minat Hidup dan Peran perilaku (Perspektif Perilaku Individu) . S1 dari UPN "V" Yogyakarta, S2 di Universitas Padjadjaran Bandung.



Dra. Sri Kussujaniatun, M. S i. Lahir di Yogyakarta, 5 Mei 1963. Ahli dalam Bidang Manajemen Pemasaran, Etika Bisnis, Bisnis Pengantar, dan Manajemen Pengantar. S1 dari UPN "V" Yogyakarta, S2 di Universitas Airlangga Surabaya.

PENGUATAN
KELOMPOK USAHA BERSAMA
KUBE
SEBAGAI
MODEL PENGEMBANGAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dra. Anis Siti Hartati, M.Si.
Dra. Sri Kussujaniatun, M.Si.

ISBN 978-623-7594-69-7



9 786237 594697



Penerbit
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

**PENGUATAN
KELOMPOK USAHA
BERSAMA (KUBE)
SEBAGAI MODEL
PENGEMBANGAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT**

Anis Siti Hartati

Sri Kussujaniatun

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, Shalawat dan Salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kesempatan kepada kami dapat menyelesaikan penulisan buku ini

Tulisan dalam penulisan buku ini terdiri dari bahasan pokok yaitu materi yang terkait dengan teori Pembentukan KUBE serta Pemberdayaan Masyarakat.

Kami menyadari bahwa buku ini belum sempurna, untuk itu kami mengharapkan saran untuk perbaikan di

masa mendatang, dan tak lupa penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta yang telah memberikan dukungan dana atas terealisasinya buku ini
2. Semua pihak yang telah berperan serta baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga kami dapat menyelesaikan buku ini.

Akhir kata mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi para mahasiswa pada khususnya dan semua pembaca pada umumnya

Yogyakarta, 2020

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	4
Bab I. Sekilas Wilayah Kabupaten Bantul	5
Bab II. Kelompok Usaha Bersaman (KUBE)	32
Bab III. Pemberdayaan Masyarakat	62
Bab IV. Profil KUBE di Kabupaten Bantul	117
Bab V. Hasil Penelitian	124
Daftar Pustaka	142

BAB 1
SEKILAS WILAYAH
KABUPATEN BANTUL

1.1 Aspek Geografis dan Demografi Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten dari lima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas administratif sbb:

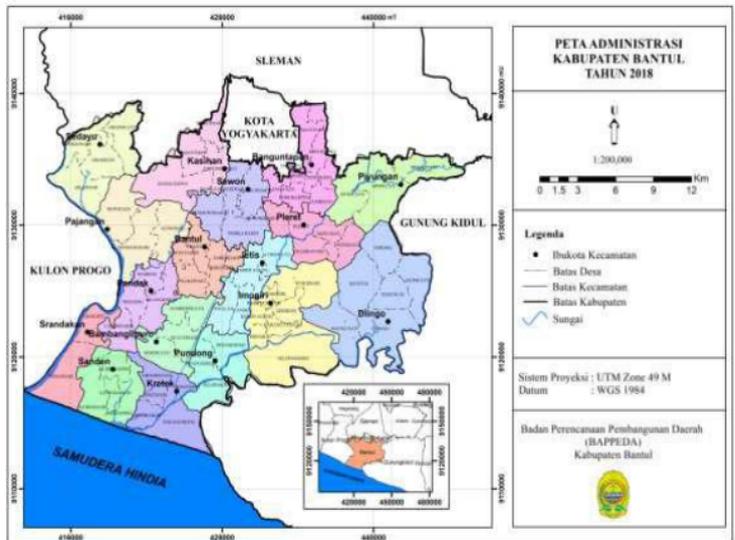
- Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia

- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Timur : Kabupaten Gunungkidul

Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 50.685 ha (15,91% dari luas DIY) dan terbagi atas 17 kecamatan. Kecamatan Dlingo merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu 5.587 ha (11,02%) sedangkan kecamatan dengan wilayah paling sempit adalah Kecamatan Srandakan yaitu 1.832 ha (3,61%).

Selain itu, wilayah Kabupaten Bantul juga terbagi atas 75 desa dan 933 pedukuhan dengan jumlah desa dan pedukuhan yang terbanyak terletak di Kecamatan Imogiri, yaitu 8 desa dan 72 pedukuhan. Sementara kecamatan dengan jumlah desa dan pedukuhan paling sedikit adalah Kecamatan Srandakan, yaitu 2 desa dan 43 pedukuhan. Berdasarkan klasifikasi wilayah, desa di Kabupaten Bantul dibagi menjadi desa pedesaan (*rural area*) sebanyak

41 desa dan desa perkotaan
(*urban area*) sebanyak 34 desa.



Gambar 1
Peta Administrasi Kabupaten Bantul

1.2 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan adalah informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Bantul. Luas lahan di Kabupaten Bantul sebesar 50.685 ha terbagi dalam beberapa klasifikasi penggunaan lahan yang terdiri dari pekarangan, sawah, tegal, dan kebun campur. Dari data penggunaan lahan di Kabupaten Bantul tahun 2013-2017 pada Tabel 2.8 di atas, dapat diketahui bahwa pada kurun waktu tersebut terjadi

pengurangan luas lahan sawah, tegal, dan kebun campur. Namun, di sisi lain pada kurun waktu yang sama terjadi penambahan luas lahan permukiman dan lahan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Bantul terjadi proses alih fungsi lahan sawah, tegal, dan kebun campur menjadi lahan permukiman dan lahan lainnya.

Adanya alih fungsi lahan sawah, tegal, dan kebun campur serta hutan menjadi lahan permukiman dan lahan lainnya ini tentunya akan berdampak

pada berkurangnya lahan pertanian, menurunnya produksi pangan, terancamnya keseimbangan ekosistem, serta banyaknya buruh tani yang kehilangan pekerjaan yang berakibat pada tingginya angka urbanisasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan strategis dari Pemerintah Bantul guna mengendalikan pengurangan alih fungsi lahan sawah, tegal, dan kebun campur serta hutan menjadi lahan permukiman. Dalam hal ini, kebijakan pengendalian atau pengurangan alih fungsi lahan

tersebut dilakukan dengan penetapan RDTR sebagai instrumen pengendali pemanfaatan ruang dan penetapan pemberian izin alih fungsi lahan.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, rencana pola ruang Kabupaten Bantul terdiri atas:

1. Kawasan Lindung Kabupaten

Rencana pengembangan
Kawasan Lindung
Kabupaten meliputi:

a. Kawasan hutan lindung

Penyebaran kawasan
hutan lindung meliputi
Desa Dlingo, Desa
Mangunan, Desa Muntuk,
Desa Jatimulyo, Desa
Temuwuh, Desa Terong
Kecamatan Dlingo, Desa
Wonolelo Kecamatan
Pleret, Desa Wukirsari
Kecamatan Imogiri, dan
Desa Srimulyo
Kecamatan Piyungan.

b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yaitu kawasan resapan air.

c. Kawasan perlindungan setempat

Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan pantai, kawasan sekitar mata air,

dan ruang terbuka hijau perkotaan kabupaten.

d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya

e. Kawasan rawan bencana
Kawasan rawan bencana meliputi kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan kekeringan.

2. Kawasan Budidaya
Kabupaten

Rencana pengembangan
kawasan budidaya
Kabupaten terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan
hutan rakyat,
Kawasan peruntukan
kehutanan (hutan rakyat)
direncanakan seluas
kurang lebih 8.545 Hektar
atau 16,86% dari luas
wilayah Kabupaten
Bantul.
- b. Kawasan peruntukan
pertanian,
Kawasan peruntukan
pertanian meliputi
kawasan pertanian lahan

basah, kawasan pertanian lahan kering, dan kawasan peternakan. Kawasan pertanian lahan basah direncanakan seluas kurang lebih 13.324 hektar atau 26,29%. Kawasan pertanian lahan kering di Kabupaten direncanakan seluas kurang lebih 5.247 hektar atau 10,35% dari luas wilayah Kabupaten Bantul. Kawasan peternakan di Kabupaten direncanakan sebagai berikut:

- 1) Peternakan itik di Kecamatan Kretek, Kecamatan Bantul, dan Kecamatan Sanden;
- 2) Peternakan sapi perah di Kecamatan Srandakan, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Jetis, dan Kecamatan Sedayu;
- 3) Peternakan sapi potong tersebar di hampir seluruh kecamatan;
- 4) Peternakan babi di Kecamatan Srandakan dan Kecamatan Kasihan;

- 5) Peternakan kambing tersebar di hampir seluruh kecamatan;
 - 6) Peternakan kerbau di Kecamatan Sanden dan Kecamatan Banguntapan;
 - 7) Peternakan kelinci di Kecamatan Sanden.
- c. Kawasan peruntukan perikanan,
 - d. Kawasan peruntukan pertambangan,
 - e. Kawasan peruntukan industri,
 - f. Kawasan peruntukan pariwisata,

- g. Kawasan peruntukan permukiman,
- h. Kawasan peruntukan lainnya.

1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Secara geografis dan administratif Kabupaten Bantul memiliki potensi pengembangan wilayah yang perlu direncanakan lebih lanjut. Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Bantul diperlukan karena:

- batas wilayah yang tidak berbatas secara fisik, meski

terdapat *ring road* namun perkembangan saat ini telah melewati batas tersebut;

- topografi kawasan yang relatif datar;
- tidak terdapat kendala terhadap kawasan resapan air;
- banyaknya daerah wisata yang belum tergarap secara optimal untuk pengembangan sektor hotel dan restoran.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, potensi pengembangan kawasan di Kabupaten Bantul dilakukan dengan penetapan kawasan strategis kabupaten yang meliputi kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis sosio-kultural, dan pengembangan kawasan strategis lingkungan hidup.

Kawasan strategis ekonomi kabupaten meliputi:

1. Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY);

2. Kawasan Strategis Bantul Kota Mandiri (BKM);
3. Kawasan Strategis Pantai Selatan, Pengembangan Pesisir dan Pengelolaan Hasil Laut Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, dan Pantai Pandansimo;
4. Kawasan Strategis Industri Sedayu; dan
5. Kawasan Strategis Industri Piyungan.

Sementara itu, kawasan strategis sosio-kultural kabupaten meliputi kawasan strategis desa wisata dan

kerajinan Gabusan-Manding-Tembi (GMT) dan Kasongan-Jipangan-Gendeng-Lemahdadi (Kajigelem). Sementara kawasan strategis lingkungan hidup kabupaten meliputi:

1. Kawasan strategis agrowisata di Kecamatan Dlingo dan agropolitan di Kecamatan Sanden, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, dan Kecamatan Dlingo; dan
2. Kawasan strategis gumuk pasir Parangtritis yang berfungsi untuk

pengembangan ilmu
pengetahuan dan penelitian.

1.4. Desa Timbulharjo

Desa Timbulharjo

Kode Desa: 340215202

Kepala Desa: Drs. Kandar

Alamat Balai Desa: Jalan

Margorejo Cangkringmalang

Mriyan Timbulharjo Kecamatan

Sewon Kabupaten Bantul

Koordinat: -

7.871337,110.360745

Kode Pos: 55186

Telepon:

E-mail:

kantordesatimbulharjo@yahoo.

com

Situs web:
<http://desatimbulharjo.wordpress.com>

Desa Timbul Harjo merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah administratif Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terbagi dalam 16 Pedukuhan dan 122 RT. Desa Timbulharjo letak topografis tanahnya adalah rata, dengan lahan sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian sehingga sebagian besar masyarakatnya

adalah petani dan buruh tani/perkebunan.

1.4.1. Batas-batas Wilayah Desa Timbulharjo adalah sebagai berikut :

Utara : Desa Panggunharjo
Kec. Sewon dan Desa Bangunharjo Kec Sewon

Timur : Desa Wonokromo
Kec. Pleret dan Desa Trimulyo
Kec. Jetis

Selatan : Desa Sumberagung Kec. Jetis dan
Desa Sabdodadi Kec. Bantul

Barat : Desa Trirenggo
Kec Bantul dan Desa Pendowoharjo Kec Sewon

1.4.2. Luas Wilayah

Desa Timbulharjo memiliki wilayah seluas 777,89 ha, dengan rincian sebagai berikut :

1) Fasilitas Umum: 170,0920Ha

- Jalan 1,0150 Ha
- Fasilitas Pasar 1,6250 Ha
- Lapangan Olahraga 1,8210 Ha
- Perkantoran Pemerintah 3,1270 Ha
- Tempat Pemakaman Umum 3,9280 Ha
- Tanah Bengkok 52,5500 Ha
- Sawah Desa 98,8310 Ha

2) Tanah Sawah 284,0060 Ha
Tanah sawah irigasi teknis
154,7490 Ha. Tanah sawah
irigasi setengah teknis
129,2570 Ha.

1.4.3. Letak Desa Timbulharjo

Desa Timbulharjo terletak pada posisi koordinat Bujur 110.3644 dan Lintang -7.87159 dengan ketinggian kurang lebih 40 M diatas permukaan laut.

Berdasarkan data desa pada bulan Desember 2016, jumlah penduduk Desa Timbulharjo sebanyak 22.576 orang. Jumlah

Kepala Keluarga (KK) sebanyak 6391 KK.

Jumlah penduduk Desa Timbulharjo usia produktif pada tahun 2016 adalah 7991 orang. Jumlah angkatan kerja tersebut jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut:

No	Angkatan Kerja	L	P	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	623	655	1278
2.	SD/ Sederajat	1811	1814	3625
3.	SLTP/ Sederajat	861	876	1737
4.	SLTA/Sederajat	1653	1774	3427
5.	Perguruan Tinggi/Sederaja	562	573	1135

6.	Buta Aksara dan Huruf/Angka Latin	68	75	143
	Jumlah	5578	5767	11345

BAB II

KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)

3.1. Program Kelompok Usaha Bersama

Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (KUBE PKH) merupakan satu langkah strategis dan berdampak pada perbaikan ekonomi yang positif dalam pelaksanaan dan penerapan PKH dalam satu wilayah pengembangan. Bukan saja strategis dalam upaya pencapaian tujuan-tujuan pokok

PKH dalam peningkatan peran aktif dan komitmen peserta dan pelaku PKH akan tetapi secara ekonomis menjadi sebuah harapan dan terobosan pencapaian tingkat perbaikan kesejahteraan peserta PKH itu sendiri.

Keberadaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE-PKH) bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di tengah-tengah masyarakat akan menjadi sarana untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif (khususnya dalam peningkatan pendapatan),

menyediakan sebagian sebagian kebutuhan yang diperlukan bagi keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), menciptakan keharmonisan hubungan sosial antar warga, menyelesaikan masalah sosial yang dirasakan keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), pengembangan diri dan sebagai wadah berbagi pengalaman antar anggota.

Kehadiran KUBE-PKH Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) merupakan media untuk meningkatkan motivasi warga miskin untuk lebih maju

secara ekonomi dan sosial, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber sosial ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak yang terkait.

Melalui kelompok, setiap keluarga miskin dapat saling berbagi pengalaman, saling berkomunikasi, saling mengenal, dapat menyelesaikan berbagai

masalah dan kebutuhan yang dirasakan. Dengan sistem KUBE-PKH, kegiatan usaha yang tadinya dilakukan secara sendiri-sendiri kemudian dikembangkan dalam kelompok, sehingga setiap anggota dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan usaha ekonomi produktif, usaha kesejahteraan sosial serta kemampuan berorganisasi.

Kegiatan yang berkaitan dengan usaha kesejahteraan sosial dapat berupa: pengelolaan santunan hidup,

Iuran Kesetiakawanan Sosial (IKS), arisan, pengajian, perkumpulan kematian, usaha simpan pinjam, pelayanan koperasi, usaha tolong menolong atau gotong royong, usaha pelayanan sosial untuk membantu orang tidak mampu, usaha-usaha untuk mencegah timbulnya permasalahan sosial di lingkungannya, dan usaha-usaha UKS lainnya. Kegiatan yang berkaitan dengan usaha ekonomi produktif (UEP) dapat berupa usaha dagang, jasa, pertanian, dan lain-lain, sedangkan kegiatan yang

bersifat penataan kelembagaan, seperti: pengelolaan keuangan, pencatatan dan pelaporan.

Melalui KUBE-PKH diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan berfikir para anggota karena mereka dituntut suatu kemampuan manajerial untuk mengelola usaha yang sedang dijalankan, dan berupaya menggali dan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia di lingkungan untuk keberhasilan kelompoknya. Selain itu, diharapkan dapat menumbuhkan kembangkan sikap-sikap

berorganisasi dan pengendalian emosi yang semakin baik serta dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, rasa kepedulian dan kesetiakawanan sosial, baik di antara keluarga binaan sosial maupun kepada masyarakat secara luas.

KUBE-PKH dibentuk dilandasi oleh nilai filosofis “dari”, “oleh” dan “untuk” masyarakat. Artinya bahwa keberadaan suatu kelompok KUBE-PKH di manapun (desa atau kota) adalah berasal dari dan berada di tengah-tengah

masyarakat. Pembentukannya oleh masyarakat setempat dan peruntukannya juga adalah untuk anggota dan masyarakat setempat. Karena konsep yang demikian, maka pembentukan dan pengembangan KUBE-PKH harus bercirikan nilai dan norma budaya setempat, harus sesuai dengan keberadaan sumber-sumber dan potensi yang tersedia di lingkungan setempat, juga harus sesuai dengan kemampuan SDM (anggota KUBE-PKH) yang ada.

KUBE-PKH harus diwujudkan dalam bentuk kerjasama yang berlangsung secara terus menerus, bukan hanya untuk jangka pendek tetapi jangka panjang. Kerjasama yang tulus biasanya hanya dapat diwujudkan bila dilandasi oleh dengan semangat kekeluargaan, kegotongroyongan, dan kesetiakawanan sosial. Dalam kelompok terjadi interaksi atau hubungan yang saling ketergantungan, dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya yang pada

akhirnya menimbulkan semangat kekeluargaan, kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial di antara mereka, bahkan dengan lingkungan eksternal kelompok.

KUBE-PKH dimaksudkan untuk mewujudkan keberfungsian sosial para anggota KUBE-PKH dan keluarganya, yang meliputi meningkatnya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari dan berubahnya sikap dan tingkah laku dalam mengatasi permasalahan-permasalahan

yang dihadapi serta meningkatnya kemampuan dalam menjalankan peranan-peranan sosialnya dalam masyarakat. Keberadaan usaha-usaha ekonomis produktif yang bersifat ekonomis dalam kelompok KUBE-PKH hanya sebagai sarana bukan sebagai tujuan. Banyak orang beranggapan bahwa aspek ekonomi atau UEP dalam KUBE-PKH sebagai tujuan dan sering dijadikan sebagai ukuran keberhasilan KUBE-PKH. Ini adalah suatu hal yang keliru.

Pendekatan pola kelompok KUBE dimana justru mendorong bagaimana masyarakat miskin mampu berdaya secara mandiri dan bersama-sama dengan masyarakat miskin lainnya. Budaya khas masyarakat Indonesia yang mengedepankan kegotong royongan, justru menjadi pilar utama dalam pengembangan KUBE ini. Pola KUBE justru memberi ruang yang luas dalam hal budaya lokal masyarakat (local wisdom). Peran KUBE adalah menstrasformasikan budaya

Iokal tersebut menjadi sarana dan sumberdaya dalam rangka mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan.

KUBE menjadi wadah bergabungnya warga masyarakat keluarga miskin, sehingga memungkinkan mereka melakukan interaksi sosial yang positif dan demokratis.

Melalui KUBE warga masyarakat keluarga miskin dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi, menyelesaikan masalah-masalah personal dan kelompok

secara timbal balik, yang pada akhirnya memikat dan martabat kemanusiaan mereka. Secara ekonomi, kegiatan usaha yang dilakukan dalam kelompok, member kekuatan untuk menghimpun kekuatan modal, kemampuan bersaing, membangun jejaring, membuka peluang mengakses.

Keberadaan kelompok terkait dengan harapan orang untuk memenuhi kebutuhan yang tak dapat dilakukannya sendiri untuk dapat memenuhi kelompok usaha bersama dengan cara berkolaborasi

Indonesia.

Sasaran program Kelompok Usaha Bersama adalah keluarga fakir miskin yang tidak mempunyai sumber pencaharian atau memiliki pencaharian tetapi sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, air bersih, kesehatan, dan pendidikan).

Tujuan pemerintah adalah melayani kebutuhan masyarakat dengan sebaik-baiknya, yang dilaksanakan dengan pembentukan departemen atau dinas yang melaksanakan

program. Adapun dinas terkait yang menjadi pelaksana dan penanggung jawab program KUBE di sajikan oleh Dinas Sosial disetiap daerah

3.2. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama

KUBE dibentuk dilandasi oleh nilai filosofis “dari”,”oleh”,dan “untuk” masyarakat. Artinya bahwa keberadaan suatu kelompok usaha bersama dimanapun (desa atau kota) adalah berasal dari dan berada ditengah-tengah masyarakat. Pembentukannya oleh masyarakat setempat dan

peruntukannya juga untuk anggota dan masyarakat setempat. Karena konsep yang demikian maka pembentukan dan pengembangan KUBE harus berincikan nilai dan norma budaya setempat, harus sesuai dengan keberadaan sumber-sumber dan potensi yang tersedia di lingkungan setempat, juga harus sesuai dengan kemampuan SDM (anggota KUBE) yang ada. KUBE merupakan metode pendekatan yang terintegrasi dan keseluruhan proses pemberdayaan masyarakat.

Pembentukan KUBE dimulai dengan proses pembentukan kelompok sebagai hasil bimbingan sosial, pelatihan keterampilan, bantuan stimulasi dan pendampingan.

3.3. Tujuan Kelompok Usaha

Bersama

Tujuan KUBE diarahkan kepada upaya mempercepat penghapusan kemiskinan melalui :

- a. Peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok.
- b. Peningkatan pendapatan atau peningkatan kemampuan

anggota kelompok KUBE didalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari ditandai dengan :meningkatkan pendapat keluarga, meningkatkan kualitas pangan, sandang, papan, kesehatan tingkat pendidikan; dapat melaksanakan kegiatan keagamaan; dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan kebutuhan social lainnya.

- c. Pengembangan usaha
- d. Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara

para anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar atau meningkatkan kemampuan anggota kelompok KUBE dalam menampilkan peranan-peranan sosialnya, baik dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya, ditandai dengan semakin meningkatnya kepedulian dan rasa tanggung jawab dan keikutsertaan anggota dalam usaha-usaha kesejahteraan social dilingkungannya.

3.4. Kelembagaan Kelompok Usaha Bersama

Dilihat dari segi kelembagaan

setiap melakukan binaan keluarga KUBE mempunyai kelembagaan:

a. Kriteria Anggota

- 1) Keluarga miskin yang mempunyai pendapatan dibawah garis kemiskinan
- 2) Warga masyarakat yang berdomisili tetap
- 3) Usia produktif
- 4) Menyatakan kesediaan bergabung dalam kelompok
- 5) Memiliki potensi dan keterampilan dibidang usaha ekonomi tertentu

b. Jumlah Anggota KUBE

- 1) Jumlah keanggotaan KUBE dapat bervariasi tergantung kebutuhan nyata dilapangan/ situasi dan kondisi lokal dan kesepakatan kelompok itu sendiri.
- 2) Jumlah KUBE terdiri dari 5-10 KK (Kube Kelompok Kecil)
- 3) Karena sifat suatu kegiatan dan kepentingan tertentu , kelompok KUBE dapat terdiri dari kelompok besar (gabungan beberapa kube atau kelompok kecil). Namun pembinaan

secara rutin tetap dalam KUBE kelompok kecil

- 4) Suatu kelompok KUBE yang anggota dikategorikan keluarga miskin dapat memilih anggotanya yang bukan termasuk kategori miskin, namun mempunyai semangat kewirausahaan namun jumlah anggota yang bukan dari keluarga miskin hanya 20% dari anggota KUBE yang ada.

- c. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok

- 1) Kedekatan tempat tinggal
 - 2) Jenis usaha atau keterampilan anggota
 - 3) Ketersediaan sumber/keadaan geografis
 - 4) Latar belakang kehidupan budaya
 - 5) Memiliki motivasi yang sama
 - 6) Keberadaan kelompok-kelompok masyarakat sudah tumbuh
- d. Struktur dan Kepengurusan KUBE
- 1) Struktur organisasi suatu bentuk tanggung jawab yang harus dijalankan.

Dengan struktur dapat diketahui “ siapa mengerjakan apa”, siapa berkewajiban dan bertanggung jawab apa”.

- 2) Struktur KUBE sangat tergantung pada kegiatan atau jenis usaha yang dijalankan oleh KUBE tersebut
- 3) Perumusan struktur KUBE yang terdiri dari : ketua, sekretaris, bendahara
- 4) Kepengurusan dipilih berdasarkan hasil musyawarah atau kesepakatan anggota

bersama

e. Kewajiban anggota

- 1) Mengikuti dan mentaati semua ketentuan-ketentuan yang ada yang sudah disepakati
- 2) Mewujudkan tujuan yang ingin dicapai bersama
- 3) Membangun kerjasama dengan berbagai pihak
- 4) Memanfaatkan dana bantuan modal usaha dengan penuh tanggung jawab.

3.5. Pembinaan, Monitoring Dan
Evaluasi

a. Pembinaan dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penumbuhan dan pengembangan KUBE, disamping meningkatkan motivasi dan kemampuan pelaksanaan dilapangan serta kapasitas manajemen pengelola KUBE. Pembinaan dilaksanakan oleh petugas sosial wilayah mulai dan tingkat propinsi, kabupaten / kodya, kecamatan dan desa / kelurahan secara berjenjang

- b. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan KUBE dan permasalahan yang merupakan hambatan serta upaya pemecahannya, sehingga upaya penumbuhan dan pengembangan KUBE berjalan sesuai dengan rencana
- c. Kegiatan monitoring dan evaluasi beserta pelaporannya dilaksanakan melalui mekanisme secara berjenjang mulai dan tingkat desa, kecamatan, kabupaten /

kodya, propinsi dan pusat dalam koordinasi Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) PROKESRA secara berjenjang seperti dalam lampiran 5 (Bagan KUBE).

BAB III

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

4.1. Pengertian dan Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata daya “daya” yang mendapat awalan ber- menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan – m- dan akhiran –an menjadi

“pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan.

Kata “pemberdayaan” adalah terjemahan dari bahasa inggris “Empowerment” , pemberdayaan berasal dari kata dasar “power” yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan “em” pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang.

Khususnya pada kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam : a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka

perluan; c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata (Zubaidi, 2013). Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku

pemberdayaan. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan.

Menurut Mubarak (2010) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-

hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat.

Pada Pemberdayaan pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi.

Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen

karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya.

Pemberdayaan ada tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana

atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi masyarakat tidak menyadari, atau bahkan belum diketahui. Oleh karena itu, daya harus digali, dan kemudian dikembangkan. Berdasarkan asumsi tersebut maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya dengan dilandasi proses kemandirian.

Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya (Widjajanti, 2011). Disamping itu dapat melibatkan kaum perempuan dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan, sehingga dapat mendukung peningkatan ekonomi keluarga. Penelitian tentang pemberdayaan perempuan tersebut pernah dilakukan oleh (Kussujaniatun, 2014).

Kartasasmita (1996) mengemukakan bahwa upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara yakni:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat dari kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan dan potensi

kemandirian tiap individu perlu untuk diberdayakan.

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sasaran yang baik fisik (irigasi, jalan, dan listrik). Maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Terbentuknya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin

berdaya, seperti tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran. Peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

3. Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya

persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah. (diambil dari jurnal)

4.2. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi lebih mandiri. Dimana kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh

kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

Kondisi kognitif adalah kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan masyarakat dalam rangka mencari solusi atas

permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu perilaku yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitive terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah *sense* yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan untuk diintervensi dalam mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kondisi psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka menuju

kemandirian. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri.

Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan

mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan pengeralahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisikmaterial. Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pada

pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif

adalah merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku.

Kemampuan

psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan. Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada

terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan/ daya dari waktu ke waktu,

dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal (Ambar Teguh, 2004: 80-81). Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai

sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Pengertian “proses” menunjukkan pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pertahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum

berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik knowledge, attitude, maupun practice (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan-keterampilan yang baik.

Makna “memperoleh” daya/ kekuatan/ kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga

memiliki keberdayaan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat yang mencari, mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta pada pihak lain untuk memberikan daya/ kekuatan/ kemampuan. Iklim seperti ini hanya akan tercipta jika masyarakat tersebut menyadari ketidakmampuan/ ketidakberdayaan/ tidak adanya kekuatan, dan sekaligus disertai dengan kesadaran akan

perlunya memperoleh daya/
kemampuan/ kekuatan.

Makna kata
“pemberian” menunjukkan
bahwa sumber inisiatif bukan
dari masyarakat. Insisatif untuk
mengalihkan daya/kemampuan/
kekuatan, adalah pihak-pihak
lain yang memiliki kekuatan
dan kemampuan, misalnya
pemerintah atau agen-agen
lainnya. Senada dengan
pengertian ini Prijono &
Pranarka (1996: 77)
menyatakan bahwa:
pemberdayaan mengandung dua
arti. Pengertian yang pertama

adalah *to give power or authority*, pengertian kedua *to give ability to or enable*. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang/ belum berdaya. Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Berbeda dengan pendapat
Pranarka, Sumodiningrat

(Sumodiningrat, 2000 dalam Ambar Teguh, 2004: 78-79) menyampaikan: pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia daripada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai empowerment, dan istilah itu benar tapi tidak tepat.

Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan” daripada “pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang paling tepat adalah “*energize*” atau katakan memberi “energi” pemberdayaan adalah

pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.

Menurut Mubarak (2010) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat.

Pada Pemberdayaan pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan

pembangunan yang memanusiaikan manusia. Dalam pandangan ini pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut

dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya (Soetomo, 2006).

4.3 Unsur-unsur Pemberdayaan

Upaya pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan sedikitnya 4 (empat) unsur pokok, yaitu:

1. Aksesibilitas informasi, karena informasi merupakan kekuasaan baru kaitannya dengan : peluang, layanan, penegakan hukum,

efektivitas negosiasi dan akuntabilitas. Contohnya: Masyarakat membutuhkan informasi yang komprehensif terutama tentang pemberdayaan lingkungan dimana nantinya masyarakat diharapkan mampu menjaga lingkungan sekitar agar selalu bersih dan nyaman untuk ditempati dan mengurangi angka kesakitan di masyarakat.

2. Keterlibatan dan partisipasi, yang menyangkut siapa yang dilibatkan dan bagaimana mereka terlibat dalam

keseluruhan proses pembangunan. Contohnya: Dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan lingkungan tidak hanya pemerintah setempat dan badan yang bekerja tetapi juga masyarakat harus ikut serta dalam setiap kegiatan agar masyarakat mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan diharapkan masyarakat mampu menerapkan dikehidupan sehari-hari

3. Akuntabilitas, kaitannya dengan pertanggung jawaban

publik atas segala kegiatan yang dilakukan dengan mengatasnamakan rakyat. Contohnya: Dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh masyarakat diharapkan berkonsultasi dengan bidan atau pemerintah setempat agar ada timbal balik antara bidan, masyarakat, dan pemerintah dalam melakukan kegiatan serta dapat dipertanggung jawabkan.

4. Kapasitas organisasi lokal, kaitannya dengan

kemampuan bekerja sama, mengorganisasi warga masyarakat, serta memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Contohnya: Bidan harus mampu bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah setempat atau menjalin komunikasi yang baik sehingga dalam mengadakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan lingkungan masyarakat mudah untuk diajak bekerjasama sehingga

setiap ada masalah dapat di selesaikan secara bersama-sama/ musyawarah.

4.4. Tahap-Tahap Pemberdayaan

Proses pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan eksternal. Tanpa mengecilkan arti dan peranan salah satu faktor, sebenarnya kedua faktor tersebut saling berkontribusi dan mempengaruhi secara sinergis dan dinamis. Faktor internal sangat penting sebagai salah satu wujud self-organizing dari masyarakat namun kita juga perlu

memberikan perhatian pada faktor eksternalnya.

Seperti yang dilaporkan Deliveri (2004), proses pemberdayaan masyarakat mestinya juga didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multidisplin. Tim pendamping ini merupakan salah satu faktor eksternal dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tim pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu

melanjutkan kegiatannya secara mandiri.

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi (Sumodiningrat, 2000 dalam Ambar Teguh, 2004, 82). Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan

pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap.

Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi:

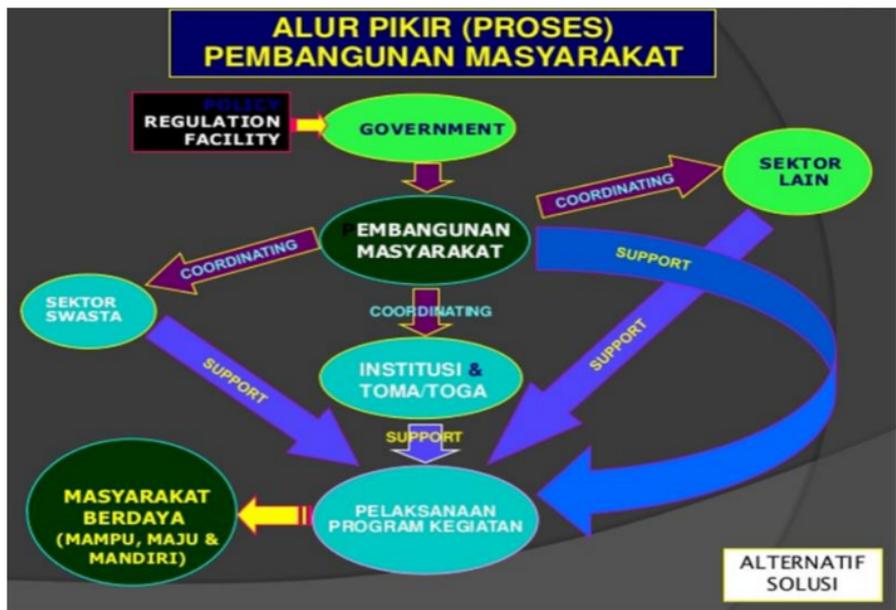
1. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menjupерilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.

2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian (Ambar Teguh, 2004: 83).

4. Tahap Pemandirian.
Berpegang pada prinsip pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya, maka arah pemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola kegiatannya proses pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan eksternal. Dalam hubungan ini, meskipun

faktor internal sangat penting sebagai salah satu wujud *self organizing* dari masyarakat, namun kita juga perlu memberikan perhatian pada faktor eksternalnya. Proses pemberdayaan masyarakat mestinya juga didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multi disiplin. Tim pendamping ini merupakan salah satu faktor eksternal dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tim pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap

selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu bagaimana menjalankan kegiatannya secara mandiri.



Gambar 3.1

Alur Pikir (Proses) Pembangunan Masyarakat

4.5. Definisi dan Konsep Potensi Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan proses kenaikan pendapatan perkapita daerah tersebut dalam jangka panjang. Teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah adalah adanya permintaan barang dan jasa dari luar daerah tersebut, sehingga sumberdaya lokal akan dapat menghasilkan kekayaan daerah sekaligus

dapat menciptakan peluang kerja di daerah. Hal ini berarti bahwa sumberdaya lokal baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia merupakan pemegang kunci yang sangat strategis dalam perekonomian suatu daerah. Sumberdaya lokal yang merupakan potensi ekonomi harus dapat dikembangkan secara optimal sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah.

Peningkatan ekonomi pada Sri Kussujaniatun, 2017 dilihat dari

dimensi pasar, jaringan usaha, dan sumber dana.

a. Pasar

Prinsip dasar dari proses pemasaran menurut Kotler (2010) yang utama adalah bagaimana kita dapat memahami keinginan dan kebutuhan dari konsumen. Orientasi pasar pada penelitian ini dilihat dari faktor saluran distribusi, ekspor melalui distributor, dan jumlah buyer. Kotler (2010) menyatakan bahwa saluran distribusi suatu barang adalah keseluruhan

kegiatan atau fungsi untuk memindahkan produk disertai dengan hak pemiliknnya dari produsen ke konsumen akhir atau pemakai industri. Distribusi memperlihatkan berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menjadikan produk atau jasa diperoleh dan tersedia bagi target market (Sukotjo dan Radix, 2010). Distribusi terjadi di antara tahapan dari supply chain. Aliran bahan baku yang diperlukan berpindah dari supplier

menuju suatu perusahaan pembuat produk dan perusahaan tersebut akan memindahkan barang jadi yang dihasilkan ke tangan konsumen. Jaringan distribusi yang tepat dapat digunakan untuk mencapai berbagai macam tujuan dari supply chain, mulai dari biaya yang rendah sampai respon yang tinggi terhadap permintaan dari pelanggan (Chopra dan Peter, 2010).

Ekspor adalah seluruh benda dan jasa yang dijual ke negara lain ditambah dengan jasa-jasa

yang diselenggarakan ke negara tersebut berupa pengangkutan, permodalan, dan hal-hal lainnya yang menunjang ekspor tersebut (Lestari, 2009).Sebenarnya peluang untuk mengembangkan UKM yang akan memasuki pasar ekspor masih sangat memiliki prospek dan memiliki potensi yang cukup besar di masa mendatang. Hal ini terutama bila dilihat dari produk unggulan UKM yang selama ini dikenal sebagai produk ekspor nonmigas dari negara

kita antara lain produk pertanian, perkebunan, perikanan, tekstil dan garmen, furniture, produk industri pengolahan, dan barang seni/kerajinan yang kesemuanya merupakan produk berteknologi sederhana.

Konsumen yang menjadi target dan memiliki daya beli harus ditentukan terlebih dahulu. Menurut Deswindi (2007) perilaku konsumen menyangkut suatu proses keputusan sebelum pembelian serta tindakan dalam

memperoleh, memakai,
mengkonsumsi, dan
menghabiskan produk.
Memahami perilaku
konsumen meliputi perilaku
yang dapat diamati seperti
jumlah yang dibelanjakan,
kapan, dengan siapa, oleh
siapa, dan bagaimana barang
yang sudah dibeli dikonsumsi.

b. Jaringan Usaha

Jaringan usaha dilihat dari
kemampuan kerjasama dengan
pihak lain. Kerjasama adalah
suatu usaha bersama antara
kedua belah pihak manusia
untuk tujuan bersama dan

mendapatkan hasil yang lebih cepat dan lebih baik. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama dalam menjalankan kehidupan (Surminah, 2013). Menurut Kismantoroaji, dkk (2016) industri kecil perlu melakukan koordinasi dengan jejaring ke belakang, untuk kontinuitas produksi dan pengembangan teknologi tepat guna untuk penghalus produk secara manual dan semi mekanis serta peningkatan keterampilan, dan penguatan modal, di samping jejaring ke

depan, yaitu membuka akses pasar dengan meluaskan saluran pemasaran, promosi, membuka *outlet* dan inovasi produk, dan dibentuk jalinan kerjasama dalam bentuk kelompok atau subkontrak. *Changes in the enterprises' approach to cooperation can be observed over the last few years – the scope and types of cooperation forms are becoming more numerous, and one of the key success factors is economic effects resulting from integration of companies* (Tomaszuk, 2017).

c. Sumber Dana

Perbankan sebagai sumber dana dari pihak luar. Salah satu pelayanan kredit yang diberikan bank kepada nasabahnya yaitu kredit modal kerja. Pengertian kredit modal kerja menurut Dendawijaya (2001) adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabah (debitur) untuk memenuhi kebutuhan modal kerja debitur. Prinsip dari modal kerja ini adalah penggunaan modal yang akan habis dalam satu siklus usaha yaitu dimulai dari perolehan uang tunai dari kredit bank kemudian

digunakan untuk membeli barang dagangan atau bahan-bahan baku kemudian diproses menjadi barang jadi lalu dijual baik secara tunai atau kredit selanjutnya memperoleh uang tunai kembali. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan membutuhkan dana yang cukup untuk menjamin kelangsungan operasinya tersebut. Pada penelitian ini sumber dana dari pihak perbankan dilihat dari kemudahan memperoleh dana, jumlah pinjaman dana, besarnya bunga pinjaman. Modal sendiri menurut Mardiyatmo (2008) adalah modal yang diperoleh dari pemilik usaha

itu sendiri. Modal sendiri terdiri dari tabungan, sumbangan, hibah, saudara, dan lain sebagainya. Pentingnya membuat perencanaan usaha dan membuat perhitungan rugi laba, agar modal sendiri ini berlebih, tidak mengalami kekurangan.

BAB IV

PROFIL KELOMPOK USAHA BERSAMA DI DESA TIMBUL HARJO SEWON BANTUL

Masyarakat Sewon, Bantul merupakan masyarakat sub-urban dimana lokasinya terletak diperbatasan antara perkotaan dan pedesaan. Hal ini ternyata berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat Sewon lebih senang untuk bekerja diluar Sewon, dan apabila dilakukan pelatihan pengembangan diri akan kurang diminati.

KUBE adalah bagian dari program pemerintah yang bernama Program Keluarga Harapan (PKH) dimana anaknya mendapat bantuan PKH untuk pendidikan dan kesehatannya, dan modal usaha dari KUBE untuk pemberdayaan orangtuanya, sehingga pendamping didiklat, dididik, dibimtek untuk sebagai pendamping PKH. Walaupun ada bimtek untuk pendamping KUBE itu hanya dilakukan selama 3 hari sehingga dinilai masih kurang dalam pelaksanaannya melakukan pendampingan KUBE. Permodalan KUBE lebih kepada usaha apa yang

dijalankan oleh pemeroleh bantuan PKH, sehingga tingkat keberhasilan KUBE dinilai masih rendah. Walaupun tingkat keberhasilannya diatas 50% tetapi pertumbuhannya masih lambat.

KUBE dibentuk karena sudah memiliki embrio usaha atau peserta yang berminat untuk melakukan usaha dagang. Sehingga, KUBE ini murni dari minat peserta KUBE, tidak ada pelatihan yang diperoleh anggota KUBE, kekurangannya adalah masih belum terbentuknya pengelolaan KUBE yang baik seperti melakukan

administrasi usaha, pembuatan pelaporan usaha, disinilah peran serta pendamping KUBE.

Pendamping KUBE masih mengalami kesulitan dalam mengelompokkan anggota KUBE yang seragam minat dan usaha sehingga KUBE lebih kepada kuota untuk memenuhi persyaratan jumlah anggota KUBE baru diputuskan untuk usaha seperti apa. Pendamping mengharapkan pemerintah daerah maupun pusat juga turut andil pembentukan KUBE, dimana tidak hanya untuk pemenuhan kuota, tetapi ditentukan

terlebih dahulu usaha apa yang akan dijalankan, membuat business plan, dan selanjutnya diajukan proposal kepada pemerintah daerah untuk pengajuan pendanaan KUBE sehingga hasilnya akan lebih efektif dan sesuai dengan target pemerintah.

KUBE dibagi menjadi dua tahapan yaitu KUBE penumbuhan dan KUBE pengembangan. Bantuan untuk KUBE penumbuhan dalam setahun berjumlah Rp 20.000.000,00, di Sewon, Bantul sendiri ada 12 KUBE. KUBE KUBE diberikan pendampingan

untuk pembuatan pelaporan usaha, sehingga KUBE yang semakin berkembang akan mendapat tambahan lagi untuk pemodalan. Perkiraan tambahan modal untuk KUBE pengembangan yaitu Rp 10.000.000,00. Pengukuran penilaian keberhasilan KUBE di Sewon, Bantul dilihat dari bertambahnya aset yang lebih dari besar dari modal yang diberikan.

KUBE juga bekerja sama dengan program pemerintah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dimana anggotanya ada dari PKH dan non PKH. Di Bantul sendiri

penerimanya ada sekitar 93.000 orang setiap bulannya penerima Rp 110.000,00, penerima BPNT diminta membelanjakan bantuan tersebut ke warung-warung yang sudah ditunjuk salah satunya ke warung usaha milik KUBE.

BAB V

HASIL PENELITIAN

Design penelitian ini bersifat deskriptif dan induktif yang diharapkan dapat memberikan penjelasan model keberhasilan program dengan mencoba mengkaji pengaruh variable penentu yaitu kelembagaan KUBE, kemampuan modal ekonomi anggota KUBE, kemampuan pendidikan dan pelatihan anggota KUBE, jiwa kewirausahaan, untuk meningkatkan penghasilan dan kemandirian KUBE. Setelah dilakukan pra survai dengan mengetahui karakteristik

KUBE yang terlibat dalam penerimaan dana yang berasal dari Dinas Sosial yakni sebesar Rp 20.000.000 per KUBE. Terdapat sekitar 12 KUBE, yang setiap KUBE terdapat 10 anggota. Anggota KUBE terdiri dari 70% yang berasal dari PKH (Program Keluarga Harapan) dan 30% berasal dari masyarakat yang sudah terdaftar di BDT (Basis Data Terpadu). Sampel Penelitian adalah anggota KUBE yang berpartisipasi aktif sejumlah 70 orang, dan tersebar di desa Sewon, Bantul. Data yang digunakan adalah data primer, dikumpulkan dengan menggunakan

metode survei melalui kuesioner. Teknik analisis penelitian ini menggunakan Regresi Berganda.

Variabel

Berdasarkan rancangan penelitian terdapat beberapa variabel yang akan diteliti, seperti:

1. Variabel Bebas

Variabel bebas terdiri dari kelembagaan KUBE, jiwa kewirausahaan anggota KUBE. Kemampuan pendidikan dan pelatihan anggota KUBE, kemampuan modal ekonomi anggota KUBE, Variabel Terikat

Variabel terikat yaitu keberhasilan program KUBE.

Indikator Variabel

1. Kualitas Kelembagaan

Variabel kualitas kelembagaan memiliki beberapa sub variable yang memiliki indikator disetiap sub variable:

a) Sub Variabel

Perencanaan

Indikator: Adanya perencanaan; Keikutsertaan semua pihak dalam pembuatan; Sosialisasi perencanaan

b) Sub Variabel

Pengorganisasian

Indikator: Struktur organisasi;
Struktur organisasi; Kualitas
SDM; Kemudahan dalam
pengorganisasian

c) Sub Variabel Pelaksanaa

Indikator: Ketersediaan daya
dukung, anggaran yang
memadai, keefektifanpelaksa
naan

d) Sub Variabel Pengawasan

Indikator: Kemudahan
pengawasan; Kontinuitas
pengawasan

2. Kemampuan Modal Ekonomi
Anggota

Variabel Kemampuan Modal Ekonomi Anggota memiliki beberapa sub variable yang memiliki indikator:

- a) Sub Variabel Bantuan modal dari pelaksana KUBE

Indikator: Bantuan modal tunai; Bantuan mesin dan peralatan kerja; Bantuan bahan baku

- b) Sub Variabel Tambahan modal dari pihak lain

Indikator: Bantuan pinjaman bank; pinjaman pihak non bank; Bantuan peralatan dan bahan baku

3. Kualitas Pendidikan dan Pelatihan

Variabel Kualitas Pendidikan dan Pelatihan memiliki beberapa sub variable yang memiliki indikator:

- a) Sub Variabel Tenaga pendidik dan pelatih

Indikator: Ketersediaan tenaga pendidik dan pelatih; Kualitas tenaga pendidik dan pelatih

- b) Sub Variabel Sarana dan prasarana

Indikator: Ketersediaan sarana dan prasarana; Kualitas sarana dan Prasarana; Pemanfaatan sarana dan prasarana

c) Sub Variabel Motivasi dan pelayanan

Indikator: Motivasi peserta; Pelayanan pada peserta; Sikap pimpinan atau staf

d) Sub Variabel Penguasaan teknologi

Indikator: Ketersediaan teknologi terapan; Kemudahan akses dan penggunaan teknologi

4. Jiwa Kewirausahaan

Variabel Jiwa Kewirausahaan memiliki beberapa sub variable yang memiliki indikator setiap sub variable yakni:

- a) Sub Variabel Persepsi
terhadap perencanaan dan
pesaing

Indikator: Pemahaman terhadap
perencanaan dan persaingan;
Kemauan untuk bersaing

- b) Sub Variabel Persepsi
terhadap inovasi

Indikator: Kemauan untuk
mengembangkan diri;
Kemauan untuk tampil beda
dengan yang lain

- c) Sub Variabel Persepsi
terhadap tindakan proaktif

Indikator: Kemauan untuk
mencari informasi;

Kemampuan untuk bertidak
cepat

- d) Sub Variabel Persepsi
terhadap risiko

Indikator: Memahami akan
terjadinya resiko; Berani
mengambil resiko
daritindakannya; Selalu
belajar dari pengalaman dan
kegagalan

5. Keberhasilan Program KUBE

Variabel Keberhasilan Program
KUBE memiliki beberapa
sub variable yang memiliki
indikator yakni :

- a) Sub Variabel Peningkatan
produksidan usaha

Indikator: Jumlah produksi;
Kualitas produksi;
Penambahan jenis
produksi

b) Sub Variabel Peningkatan
kemampuanoperasional

Indikator: Kapabilitas manajer;
Peningkatan teknik; Tim
work; Peningkatan
produktivitas tenaga
kerja

c) Sub Variabel Peningkatan
kerja samadan akses pasar

Indikator: Peningkatan kerja
sama; Peningkatan
daerah pemasaran;

Peningkatan kepercayaan
dari konsumen

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknik analisa yang digunakan yakni analisis regresi berganda.

X_1 =Kualitas Kelembagaan KUBE

X_2 = Jiwa Kewirausahaan Anggota
KUBE

X_3 = Kemampuan Pendidikan dan
Pelatihan Anggota KUBE

X_4 =Kemampuan Modal Ekonomi
Anggota KUBE

Y = Keberhasilan Program KUBE

Coefficients^a

M Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	32.928	2.576		12.783	.000
X1	-.227	.143	-.136	-1.589	.117
X2	.591	.211	.378	2.804	.007
X3	-.109	.031	-.289	-3.481	.001
X4	.479	.204	.331	2.351	.022

a. Dependent Variable: Y

Dapat dituliskan persamaan jalur sebagai berikut. $Y = -0,227 X_1 + 0.591 X_2 - 0.109 X_3 + 0.479 X_4 + \epsilon_1$ Selanjutnya berdasarkan hasil

pengujian statistik diperoleh bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dengan perincian pertama,, Entrepreneurial Soul of members (X2), Quality of education and training (X3), Capital Ability of members (X4) berpengaruh secara signifikan terhadap Keberhasilan KUBE (Y). Sedangkan rincian kedua variabel kualitas kelembagaan KUBE (X1) tidak signifikan pengaruhnya terhadap keberhasilan program (Y). Adapun besaran koefisien regresi variable kualitaskelembagaan (X1) sebesar -

0,227 artinya bahwa semakin tinggi kualitas kelembagaan pengaruhnya kecil terhadap keberhasilan program. Demikian pula dengan variable kemampuan pendidikan dan pelatihan sebesar -0,109 artinya bahwa semakin meningkat kemampuan pendidikan dan pelatihan pengaruhnya kecil terhadap keberhasilan program. Sedangkan koefisien variable capital ability sebesar 0,479 artinya bahwa semakin tinggi capital ability of members pengaruhnya semakin meningkat keberhasilan program. Dan koefisien terbesar adalah variable Entrepreneurial Soul of

members sebesar 0,591 artinya bahwa semakin besar jiwa kewirausahaan akan berpengaruh semakin tinggi keberhasilan program. Sehingga variable jiwa kewirausahaan merupakan variable yang dominan berpengaruh terhadap keberhasilan program KUBE.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, jiwa kewirausahaan, kualitas pendidikan pelatihan dan, kemampuan modal berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan program. Sedangkan variable kualitas kelembagaan tidak

signifikan berpengaruh terhadap keberhasilan program. Dan jiwa kewirausahaan merupakan variabel yang dominan mempengaruhi keberhasilan program Kube di desa Timbulharjo, Sewon, Bantul.

Berdasarkan hal tersebut maka implementasi dari hasil penelitian ini adalah bahwa perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan KUBE, terutama pelatihan kewirausahaan, untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan, yang kedepannya dapat meningkatkan penghasilan dan

kemandirian PKH yang merupakan keberhasilan program KUBE.

DAFTAR PUSTAKA

Ambar Teguh Sulistyani, 2004,
Kemitraan dan Model-Model
Pemberdayaan. Yogyakarta :
Graha Ilmu

Delivery, 2004a, Pemberdayaan
Masyarakat,
[http://www.deliveri.org/guideline
s/policy/pg_3/pg_3_summary.ht
m](http://www.deliveri.org/guidelines/policy/pg_3/pg_3_summary.htm)

Departemen Sosial RI. Pedoman
Penumbuhan dan
Pengembangan Kelompok
Usaha Bersama.

Haryati Roebyanto, dkk. 2011.
*Dampak Sosial Ekonomi
Program Penanganan
Kemiskinan melalui KUBE,*
Jakarta, P3KS Press.

Kartasmita, Ginanjar, 1996.
Pembangunan Untuk Rakyat :
Memadukan Pertumbuhan Dan

Pemerataan . Jakarta: PT Pustaka
Cidesindo

Kotler, Philip, dkk., (2010). *Marketing*
3.0. Jakarta: Penerbit Erlangga

Kreitner, Robert dan Kinicki Angelo.
2003. *Perilaku Organisasi*.
Jakarta: Salemba empat

Kusnadi. 2001. *Fishermen: Adaptation
Strategies and Social Networking*
(*Nelayan : Strategi Adaptasi dan
Jaringan Sosial*). Bandung,
Humaniora Utama Press.

Kussujaniatun, Sri. 2009. *Analisis
Strategi membangun Loyalitas
konsumen melalui Differensiasi
produk. (Survai pada pengguna
sepeda motor "Yamaha Mio" di
Kab Sleman)* Seminar Nasional
V Call for Paper UTY. ISBN:
978-979-1334-25-9, 18 juli 2009.

McClelland, David C. 1997. *The
Achieving Society*. D. Van

Nostrand Company, Inc,
Princeton, New Jersey.

Mowforth, M., & Munt, I.
(2007). *Tourism and
Sustainability*. Great Britain:
Taylor and Francis Books, Inc

Mubarak, Zaki. 2010. Evaluasi
Pemberdayaan Masyarakat
Ditinjau Dari Proses
Pengembangan Kapasitas Pada
Kegiatan PNPM Mandiri
Perkotaan Di Desa Sastrodirjan
Kabupaten Pekalongan.. Tesis
Program Pascasarjana Magister
Teknik Pembangunan Wilayah
Dan Kota Universitas
Diponegoro, Semarang

Nahdia NaumiRizha dan Agus
Trilaksana. 2015.
*Pertambangan Minyak
Tradisional Di Desa
Wonocolo, Kecamatan
Kedewan, Kabupaten
Bojonegoro Tahun 1970-*

1987, Avatara, e-Journal
Pendidikan Sejarah

Portal Resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Bojonegoro. 2014. Pemkab Bojonegoro Siap Kembangkan BUMDES.
<http://dinpmd.bojonegorokab.go.id/index.php/berita/baca/3> . 12 Mei 2017

Prijono & Pranarka (1996: 77) menyatakan bahwa: pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah *to give power or authority*, pengertian kedua *to give ability to or enable*

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Wahyudi, Bambang., 2012. *Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Sebuah Tinjauan Konsep Dalam*

Upaya *Menekan*
Penyalahgunaan

Widjajanti, K. Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Volume 12, Nomor 1, Juni 2011

Zubaidi. Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik [Developing Community: Discourse and Practice]. Jakarta: Kencana. 2013





Dra. Anis Siti Hartati, M. Si. Lahir di Klaten 3 april 1965. Ahli dalam Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, Perilaku Organisasi. Sebagai penulis Buku “*Peran Life Skills Dalam Peningkatan Self Efficiency, Self Esteem, Minat Hidup dan Peran perilaku (Perspektif Perilaku Individu)*”. S1 dari UPN “V” Yogyakarta, S2 di Universitas Padjadjaran Bandung.



Dra. Sri Kussujaniatun, M. Si. Lahir di Yogyakarta, 5 Mei 1963. Ahli dalam Bidang Manajemen Pemasaran, Etika Bisnis, Bisnis Pengantar, dan Manajemen Pengantar. S1 dari UPN “V” Yogyakarta, S2 di Universitas Airlangga Surabaya.